

Revitalisasi Gerakan Pembaruan Persatuan Persis (Persis)

Ali Usman

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrack

This article describes the work of Persatuan Islam (Persis) as an Islamic organization that was born in 1923 in Bandung. Exactly, like Muhammadiyah, is a reformer group in which it has a distinctive religious outlook, founding figures, and strategies to develop organizational symbols. However, unlike Muhammadiyah, including Nahdlatul Ulama (NU), which is growing rapidly, Persis is experiencing delays, running slowly. This can be observed through at least three roles: political movements, cultural da'wab, and educational institutions. In this qualitative research based on library research, it is necessary to revitalize. It is necessary to evaluate and reflect on their work so far, starting with religious doctrine, distribution of cadres in the socio-political field, and the development of educational institutions.

Keyword: Persistence, Renewal, Movement Revitalization

Abstrak

Artikel ini mendeskripsikan kiprah Persatuan Islam (Persis) sebagai ormas Islam yang lahir sejak 1923 di Bandung. Persis, sebagaimana Muhammadiyah, merupakan kelompok pembaharu yang di dalamnya memiliki pandangan keagamaan yang khas, tokoh pendiri, dan strategi untuk mengembangkan syiar organisasi. Namun demikian, tidak seperti Muhammadiyah, termasuk juga Nahdlatul Ulama (NU), yang berkembang pesat, Persis justru mengalami keterlembatan, berjalan pelan. Hal ini bisa diamati melalui setidaknya tiga peran: gerakan politik, dakwah kultural, dan lembaga pendidikan, dalam penelitian kualitatif berdasarkan *library reseach* ini, perlu dilakukan revitalisasi. Persis perlu melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kiprahnya selama ini, mulai doktrin keagamaan, distribsi kader di bidang sosial-politik, dan pengembangan lembaga pendidikan.

Kata Kunci: Persis, Pembaruan, Revitalisasi Gerakan

A. Pendahuluan

Apa itu Persis? Sebagian orang mengira, bahwa Persis itu singkatan dari persatuan sepakbola Indonesia. Padahal, Persis dalam tulisan ini, yaitu suatu gerakan pembaruan Islam yang lahir di Bandung 1923 dan dipelopori oleh tokoh-tokoh bangsa terkenal seperti A. Hassan, Haji Zamzam, Muhammad Junus, Muhammad Natsir, Isa Anshari, dan lain sebagainya.

Terjadinya kesalahan persepsi tersebut mestinya tidak dipandang sebelah mata, dan karenanya, perlu direspons secara serius. Pertama, boleh jadi mereka benar-benar tidak tahu mengenai sepak terjang Persis dalam mewarnai semangat pembaruan Islam di Indonesia, baik pada masa prakemerdekaan maupun pascakemerdekaan RI. Kedua, boleh jadi pula, meski Persis memiliki nama dan basis massa (dan simpatisan) yang banyak, tetapi itu dulu. Bagaimana dengan sekarang?

Dalam hal ini, sikap romantisisme memang tidak sepenuhnya salah. Namun apabila terus mempertahankan sikap yang “tidak mencerdaskan” itu, yang terjadi seperti sekarang ini. Persis yang dahulu pernah besar dan menggaung di seantero nusantara, kini lambat laun suaranya mulai redup, atau mungkin tidak terdengar lagi. Kalau pun masih tersisa, hanya mengakar dan masih tersohor di tanah kelahirannya, Bandung. Tetapi dalam konstelasi *public opinion* di pentas nasional, nama Persis sudah *la yahya wala yamut* (hendak hidup dan mati pun terasa segan), dibanding ormas Islam lain seperti Muhammadiyah dan *Nabdlatul Ulama* (NU).

Persis hingga sekarang hanya menggema menjadi berita nasional di saat-saat bulan Ramadhan saja sebagai salah satu ormas Islam yang terlibat langsung dalam penentuan tanggal awal puasa dan penentuan idul fitri. Atau paling maksimal, Persis era sekarang terutama pascameninggalnya generasi awal, hanya terdengar pada ritual Mukthamar. Lebih dari itu jarang terdengar (tidak sama sekali?).

Memang, membayangkan nama Persis kembali dikenal oleh masyarakat luas tentu tidak serta merta bisa disamakan dengan Persis masa A. Hassan, dkk, karena alasan konteks zaman. (Dadan Wildan Anas, 2021) Namun setidaknya, masyarakat berhak bertanya, faktor apa sebenarnya yang menyebabkan Persis sekarang ini mengalami kemerosotan?

Di antara cara efektif dengan melakukan evaluasi kritis atas perjalanan Persis selama ini, terutama pascameninggalnya *founding fathers* generasi awal. Dari itu, patut kiranya mengambil semangat pembaruan yang digencarkan oleh A. Hassan, dkk, meski di sisi lain juga perlu melakukan kritik terhadap pemikiran dan metode pembaruannya yang menurut Dudung Abdurahman, memiliki ciri puritan. (Dudung Abdurahman, 2021) Hal ini penting dilakukan untuk menemukan kembali ruh Persis yang nantinya diharapkan dapat terlahir kembali sebagai “Persis baru”, semacam “reinkarnasi” yang hadir dari semangat perkembangan zaman.

Istilah “Persis baru” yang dimaksud dalam terminologi di atas, tidaklah bermaksud hendak menumbangkan atau berusaha membubarkan Persis secara kelembagaan, yang kemudian digantikan dengan nama lain. Namun mengacu pada pentingnya melakukan re(de)konstruksi atas semua komponen-komponen yang ada di tubuh internal Persis, baik yang menyangkut paham keagamaan, metode dakwah, dan keorganisasian.

B. Literatur Review

Tulisan yang secara spesifik membahas tentang gerakan pembaruan Persis tidaklah terlalu banyak, dibanding misalnya, dengan tulisan tentang Muhammadiyah dan NU. Meski demikian, terdapat beberapa tulisan yang relevan dalam bentuk buku dan artikel di jurnal, yang kemudian juga dirujuk dalam penulisan artikel ini.

Howard M. Federspiel menulis karya penting, yang dalam edisi Indonesia, berjudul *Labirin Ideologi Muslim: Pencarian dan Pergulatan Persis di Era Kemunculan Negara Indonesia (1923-1957)* (Ruslani dan Kurniawan Abdullah, 2004) dan *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*. (Yudian W. Asmin dan Afandi Muchtar, 1996) Dalam kedua tulisan ini, Federspiel menjelaskan terutama pada aspek historisitas berdirinya Persis.

Dalam perspektif lain, Persis dimasukkan ke dalam kelompok purifikasi “borjuis”. Pendapat ini dikemukakan oleh Nur Khalik Ridwan dalam *Agama Borjuis: Kritik Atas Nalar Islam Murni*. (Nur Khalik Ridwan, 2004) Nur Khalik menganalisa klasifikasi kelompok Islam menggunakan teori Marxisme, yang di dalamnya terdapat kelas proletar dan borjuis. (Nur Khalik Ridwan, 2004) Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkritik nalar Islam murni yang diusung Persis, begitu pula terhadap Muhammadiyah dengan lain istilah “Islam sejati”.

Buku *Anatomi Gerakan Dakwah Persatuan Islam*, merupakan antologi, ditulis oleh para peneliti yang memiliki perhatian (para penulisnya juga memiliki latarbelakang pendidikan Persis) pada kiprah Persis. (Dadan Wildan Anas, dkk., 2021) Buku ini menjelaskan secara normatif dimensi perjuangan Persis, mulai dari sejarah kelahirannya, tokoh-tokohnya, dan respons terhadap praktik politik di Indonesia. Terdapat pula artikel jurnal polanya mirip, seperti pada tulisan Dudung Abdurahman berjudul *Persatuan Islam (Persis) pada Masa Kontemporer 1945-2015*. (Dudung Abdurahman, 2021)

Sumber tulisan lain tentang Persis pada umumnya banyak ditemukan di buku-buku yang di dalamnya menjadi bab atau sub bab, seperti *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Deliar Noer, 1996) dan *Paham Keagamaan Kaum Reformis*. (Thoha Hamim, 2000) Sebagaimana Wildan Anas, dkk., *Anatomi Gerakan Dakwah Persatuan Islam*, buku yang ditulis Deliar Noer dan Thoha Hamim lebih pada pendekatan normatif yang menjelaskan tentang sejarah, tokoh, dan kiprah perjuangan Persis.

Artikel ini tidak dimaksudkan menjelaskan kembali dari A hingga Z sejarah kelahiran dan kiprah perjuangan Persis dalam mengembangkan organisasinya, tetapi meski aspek historis itu tidak dapat dihindari, namun hanya sebagai kilas balik untuk melakukan evaluasi dan refleksi, sehingga sampai pada rumusan revitalisasi gerakan pembaruan Persis. Metode yang digunakan dalam artikel ini menggunakan pendekatan fenomenologik, yang berusaha memahami arti sebuah peristiwa berdasarkan kacamata peneliti. (Salim dan Syahrur, 2012) Pendekatan fenomenologik berupaya mendeskripsikan sebuah fakta, kemudian dilakukan interpretasi.

C. Pembahasan

Ketokohan A. Hassan dan Sepak Terjang Gerakannya

Ibarat lembaga pendidikan yang pernah besar dan berkualitas, Persis saat ini sudah kehilangan peminatnya, dalam arti, kurangnya simpati dari masyarakat skala nasional. Bandingkan dengan Persis sewaktu di tangan A. Hassan, yang membuat bulu kuduk berdiri bila dikumandangkan bentuk-bentuk pembaruan ala Persis itu. Sikap berani dan tanpa ampun melakukan debat terbuka dengan mereka yang tidak sepaham dengan Persis diusung secara konsisiten oleh A. Hassan di hampir setiap waktu.

Pada masa itu, A. Hassan sebagai “ideolog Persis” tampil di garda depan menyuarakan apa yang menjadi keyakinannya secara pribadi dan para pengikutnya. Meski kelahiran Persis dibidani oleh banyak orang seperti Haji Zamzam dan Muhammad Junus, (Anonim, 2021) tetapi A. Hassan menjadi *icon* pergerakan ini. Haji Zamzam merupakan lulusan *Darul Ulum* Mekkah, yang sejak tahun 1910-1912 menjadi guru agama di *Darul Muta'alimin* bersama teman dekatnya, yaitu Muhammadi Junus, seorang pedagang sukses yang sama-sama kelahiran Palembang, Sumatera

Selatan. Di bawah kendali A. Hassan-lah, Persis mengibarkan bendera ijtihad dan tajdid (pembaruan) Islam, yaitu mengembalikan pemahaman masyarakat yang dianggapnya telah banyak menyimpang dari makna Islam yang sebenarnya. (Anonim, 2022)

Menurut pandangan Persis, masyarakat waktu itu terjangkiti penyakit yang biasa dikenal dengan sebutan TBC (*takhayul, bid'ah* dan *khurafat*), yang itu dianggap telah mengotori kemurnian Islam. Karenanya, agenda penting yang harus dilakukan menurut Persis adalah dengan mengajak masyarakat kembali kepada pedoman al-Qur'an dan hadis (*ar-ruju' ila kitabillah wa sunnati rasulillah*). Sikap dan model dakwah seperti itu oleh Nur Khalik Ridwan disebut gerakan pemurnian Islam murni (purifikasi) dengan berpredikat sebagai kaum agamawan borjuis. (Nur Khalik Ridwan, 2004)

Istilah “borjuis” oleh Nur Khalik Ridwan mengacu pada pemetaan kelas masyarakat menurut Karl Marx, yaitu masyarakat elite yang cenderung menindas terhadap rakyat kecil, miskin, tradisional atau biasa disebut dengan “proletariat”. Dalam banyak hal, Nur Khalik memang cenderung banyak mengkritik model paham keagamaan seperti Persis maupun Muhammadiyah yang mengusung pemurnian Islam murni ala Wahabi atau gerakan salafi abad ke-18 yang digerakkan oleh Muhammad bin ‘Abduhl Wahhab.

Pendapat yang menyatakan Persis sebagai “agama elit atau borjuis” seperti anggapan Nur Khalik Ridwan di atas tampaknya memiliki kebenaran empiris. Karena pada kenyataannya, organisasi ini lahir di kalangan para pedagang muslim, dan salah satu pendirinya adalah A. Hassan yang berasal dari keluarga Arab-India yang menyusuri rute-rute perdagangan hingga ke Asia Tenggara.

A. Hassan adalah seorang keturunan Tamil, lahir di Singapura (ibunya berdarah Indonesia), datang ke Jawa untuk melakukan bisnis di bidang pembuatan pakaian dan perdagangan. Tetapi pemikirannya tentang perkara-perkara keislaman cukup maju sebagai hasil dari kerjanya sebagai redaktur *Nur Islam* di Singapura, dan dewan redaksi *Utusan Melayu*, sebuah surat kabar berbahasa Melayu yang berpengaruh di Singapura.

Tibalah A. Hassan di Surabaya sebagai tempat singgah pertama di Tanah Air sebelum ia hijrah ke Bandung dan ikut serta membidani lahirnya Persis. Sementara sejak di Surabaya, A. Hassan tidak hanya disibukkan dengan kepentingan bisnis atau

dagang semata, tetapi ia juga terlibat dalam perdebatan sengit antara paham keagamaan yang bercorak “modernis” dan “tradisional”. Maka sejak itulah, ia dinobatkan sebagai tokoh agamawan berpaham modernis, yang pada akhirnya A. Hassan pindah ke Bandung, dan tinggal di rumah salah satu pentolan sekaligus pendiri Persis, Muhammad Junus. (Deliar Noer, 1996)

Karena itu, dilihat dari latar historis berdirinya organisasi ini—yang dipelopori oleh para pedagang—Persis menurut Federspiel, mendukung doktrin-doktrin yang datang melalui “jalur komunikasi” ke Asia Tenggara dan menentang kebudayaan tertutup di Asia Tenggara demi sebuah regenerasi pemikiran dan perilaku Islam. Gerakan ini setia dengan pandangan modernis tentang Islam, sekalipun penafsirannya terhadap prinsip-prinsip modernis memberinya sebuah pandangan partikular yang tidak selalu selaras dengan para pendukung modernisme Islam lainnya di Indonesia. (Ruslani dan Kurniawan Abdullah, 2004)

Dilihat dari sisi historis, mungkin tak ada yang menyangka Persis menjadi besar dan dikenal oleh banyak orang hingga seperti sekarang ini. Perhimpunan ini bermula dari diskusi keagamaan yang diselenggarakan secara rutin oleh para pedagang yang telah lama bermigrasi—karena alasan-alasan perdagangan—dari Palembang ke Jawa Barat, hingga mereka menetap dan bangga menjadi orang Sunda. (Deliar Noer, 1996) Dua tokoh penting yang berpengaruh kuat dalam diskusi-diskusi itu adalah Haji Zamzam dan Muhammad Junus. Haji Zamzam sempat belajar di Timur Tengah selama tiga setengah tahun kemudian mengajar di sekolah agama *Darul Muta'allimun* di Bandung, kira-kira pada tahun 1910. Sedangkan Muhammad Junus, seorang pedagang, tertarik dengan persoalan keagamaan dan memiliki sebuah perpustakaan kecil yang mengoleksi karya-karya tentang Islam. Komposisi anggotanya pun sangat beragam dari pelbagai penjuru daerah, yaitu kombinasi orang-orang dari Sumatera dan Jawa Barat.

Perlu ditegaskan di sini, bahwa Persis yang mengalami perkembangan pesat di Bandung (Jawa Barat) sebenarnya didirikan oleh orang-orang Sumatera, dan begitu ia berkembang, ia mendapat dukungan terbesarnya dari orang-orang Sunda. Di antara para anggotanya dapat disebutkan seperti Haji Zamzam dan Mahmud Yunus, keduanya adalah orang Sumatera, dari Minangkabau, dan termasuk juga Muhammad Natsir; A. Hassan sendiri sebagaimana dijelaskan di atas, adalah orang berkebangsaan

Tamil, dari Singapura; A. Banaama dan Al-Kahiri berasal dari komunitas Arab; dan baru nama-nama seperti Abdurrahman, O. Qomaruddin, dan Sabirin adalah orang Sunda. (Ruslani dan Kurniawan Abdullah, 2004)

Tetapi dengan beragamnya komposisi para pelopor Persis itu justru telah menjadi kekhasannya sebagai ormas Islam garda depan di pentas nasional waktu itu. Meski memiliki sedikit massa dibanding dengan ormas lain seperti NU dan Muhammadiyah, Persis sangat lihai dan lincah bergerak menyuarakan ideologi-ideologi gerakannya. Konon, awal-awal berdirinya Persis jumlah anggotanya tidak lebih dari dua puluh orang, (Deliar Noer, 1996) dan pada tahun-tahun awal, aktivitasnya masih berkisar pada jama'ah shalat Jum'at, ketika para anggotanya berkumpul.

Dalam perkembangan selanjutnya, Deliar Noer menyebutkan bahwa jumlah anggota Persis di Bandung waktu itu tidak pernah lebih dari 300 orang, meskipun ia cukup populer di sana dan, pada tahun 1942, mengendalikan enam masjid di kota itu, yang masing-masing melayani lebih dari 500 jama'ah. Sejumlah cabang didirikan oleh para simpatisan di pelbagai kota besar dan kota kecil, sebagian besar di Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan itu pun menurut Deliar Noer, jumlah anggota organisasi yang semakin besar itu tidak lebih dari seribu orang.

Akhirnya, dari uraian singkat tentang sekilas ketokohan dan sepak terjang gerakan pembaruan Islam yang diprakarsai oleh A. Hassan bersama *founding fathers* Persis lainnya itu dirasa cukup untuk mengantarkan pada pembahasan inti dalam tulisan ini, yaitu mengenai bagaimana merumuskan kembali konsep pemikiran agar Persis dulu, kini dan esok tetap eksis di panggung nasional dengan wajah yang selalu menampilkan “kebaruan”.

Karena itu, pembahasan ini langsung mengarah pada jantung persoalan tentang pentingnya revitalisasi gerakan dakwah pembaruan Persis dalam konteks kekinian. Karenanya, metode yang digunakan dalam penulisan tentu harus melakukan pelacakan sejarah atas gerakan-gerakan dakwah Persis, yang kemudian ditafsirkan, serta melakukan rekonstruksi atau bahkan dekonstruksi pemahaman keagamaan sesuai dengan semangat zamannya.

Revitalisasi Gerakan Dakwah

Pada intinya, semua ormas Islam yang ada merupakan gerakan dakwah yang

coba dihembuskan kepada masyarakat luas dalam rangka mengemban tugas atau misi suci *ta'muruna bi al-ma'ruf wa tanbauna 'an al-munkar* (menyuruh untuk berbuat baik dan mencegah kejelekan/kejahatan) [Q.S. Ali Imran: 110], dan juga dalam rangka saling mengingatkan dalam hal kebaikan antar sesama umat muslim (*wa tawa as-shaabi al-baq*) [Q.S. al-'Asri: 3]. Hanya saja, bentuk dan metodenya berbeda di antara masing-masing ormas Islam itu.

Berbeda dengan NU, yang “agak toleran” dan cenderung “menerima dan membaur” dengan masyarakat yang menjalankan tradisi-tradisi adat dan lokalitas, Persis dan Muhammadiyah justru menolak ajaran-ajaran yang mengakar kuat di tengah masyarakat itu. Dengan dalih, mereka telah mempraktikkan amalan yang tidak sesuai dengan aqidah Islam atau al-Qur'an dan hadis. Karenanya, NU seringkali disebut “kaum tradisional”, sementara Persis dan Muhammadiyah sebagai “kaum modernis” dengan bentuk dan varian yang berbeda.

Hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam banyak hal, memang terdapat kesamaan antara Muhammadiyah dan Persis. Mulai dari doktrin ideologi hingga ke lambang (logo) pergerakannya yang sangat mirip. Mungkin hanya jargon dan *lafadh* ayatnyalah yang berbeda: Persis menggunakan jargon QS. Ali Imran: 103, dan Muhammadiyah mengambil semangat syahadat sebagai jargon gerakannya.

Begitupula jika kita lacak ideologi besar di belakang organisasi. Baik Persis maupun Muhammadiyah sebenarnya berasal dari akar yang sama, yaitu atas pengaruh gerakan Wahabi dan pembaruan dunia Islam dari 'Abduh-Rasyid Ridha—sebagai pengikut salafi Ibn Taymiyyah. (Rasyid Ridha, tt.) Terbukti, kedua-duanya sejak awal berdirinya telah banyak membaca dan mengutip langsung pendapat-pendapat yang termuat dalam *al-Manar*, *al-Urwah al-Wutsqa* dan *al-Munir*. (Burhanuddin Daya, 1995) Alhasil, gerakan pemurnian Islam ini semakin gencar dilakukan oleh kedua ormas Islam ini.

Secara lebih terperinci, Thoha Hamim juga menyebutkan tentang asal-asul pemurnian Islam, bahwa seluruh gerakannya didasarkan pada purifikasi Ibn Taimiyyah. Thoha memaparkan sebagai berikut:

Seluruh gerakan pembaruan Islam periode akhir yang didasarkan pada purifikasi—sebagaimana dibela Ibn Taimiyyah (1263-1328 M),

beranggapan bahwa tidak ada otoritas lain kecuali al-Qur'an, hadis dan praktik salaf... Sehingga persoalan keagamaan yang dimunculkannya dalam perjuangan untuk memurnikan Islam menjadi pola dasar dalam tingkatan yang berbeda. (Thoaha Hamim, 2000)

Jika demikian, jelaslah sudah benang merah yang dapat kita simpulkan, yakni Persis yang menjadi objek pembicaraan dalam tulisan ini merupakan “kepanjangan tangan” gerakan Wahabi dari Mekkah. Sehingga tak heran, bila paham keagamaan dan dakwahnya pun Persis cenderung sulit untuk diterima oleh masyarakat pelosok dikarenakan metode dakwahnya yang cenderung kaku, anti budaya setempat, dan *made in* Mekkah.

Sikap “keras” itu jelas berseberangan dan tak disukai oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, terlepas dari kelebihan dan kekurangan Persis yang telah dijelaskan panjang lebar di atas, perlu kiranya saat ini untuk melakukan evaluasi kritis sekaligus melakukan revitalisasi gerakan dakwah Persis untuk perbaikan ke depan. Mengapa mesti gerakan dakwah?

Sebab keberhasilan Persis dalam melakukan gerakan pembaruan Islam menurut saya, tidak bisa dilepaskan dari kemampuan para penjunjungnya dalam memadukan gerakan dakwah dalam tiga level sekaligus: gerakan politik, gerakan dakwah kultural, dan terakhir di level pendidikan. Kesemuanya itu sangat penting untuk kita kaji dan telaah kembali dengan mengkontekstualisasikan pada setiap problem yang dihadapi umat sekarang ini.

1. Gerakan Politik

Potret sejarah perpolitikan pada masa kejayaan Persis sungguh sangat menarik untuk ditampilkan kembali di sini. Sejak menjelang Perang dunia II hingga pascakemerdekaan komitmen politik RI, perhatian dan pencapaian tujuan-tujuan politik terus digencarkan oleh Persis. Lantas, apakah Persis termasuk organisasi keagamaan atau organisasi politik? Bagaimana sebenarnya Persis memandang politik?

Secara tegas melalui manifesto Persis, para pemimpinnya menekankan bahwa Persis pada dasarnya merupakan organisasi keagamaan, tetapi untuk membangun ideologi Islam dalam masyarakat maka Persis perlu terlibat dalam kegiatan politik. Waktu itu, anggota-anggota Persis yang berbicara atau aktif dalam bidang politik pada

umumnya melakukannya melalui beberapa organisasi politik Islam seperti Masyumi dan Front anti-komunis. (Deliar Noer, 1996)

Sikap politik yang demikian itu kemudian semakin memantapkan Persis sebagai gerakan politik Islam. Tidak hanya mewarnai “sisi luarnya” saja, tetapi Persis— sebagaimana disuarakan langsung oleh A. Hassan— hendak memasukkan nilai-nilai Islam dalam bentuk konkret seperti obsesinya mendirikan suatu kerajaan Islam atau negara Islam yang menjalankan hukum-hukum syari’ah. (M. Taufik Rahman, 2021) Sejak awal berdiri, Persis memang dikenal sebagai ormas Islam yang memiliki aktivis-aktivis nasionalisnya yang percaya terhadap kemungkinan membuat negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Berikut petikan obsesi A. Hassan tersebut:

Telah dimaklumi oleh musuh dan teman, bahwa Islam itu ialah satu agama yang mempunyai hukum-hukum, terutama pokok-pokoknya, buat *mu’amalah* (*civiel*) dan *jinayah* (kriminal), yang termasuk di dalamnya sekalian undang-undang yang perlu di dalam urusan negeri... Wajib atas kerajaan Islam, di dalam hal menghukum, mengambil hukum-hukum Islam dari al-Qur’an dan hadis-hadis yang shahih... Sekalian halal dan haram, dan yang semakna dengannya yang ada dalam al-Qur’an dan hadis di dalam urusan keduniaan, wajib dijalankan sebagaimana tersebut, dengan tidak diubah walaupun sedikit. (A. Hassan, 1984)

Isa Anshari sebagai kader Persis yang militan juga dalam bukunya *Islam dan Nasionalisme*, secara terang-terangan juga menganggap bahwa politik itu merupakan alat untuk mencapai cita-cita umat Islam. (Ruslani dan Kurniawan Abdullah, 2004) Sikap politik yang ditunjukkan Persis mengacu pada perdebatan antara Islam dan kelompok nasionalis-sekular, yang mengundang respons dari Persis. Pada kesempatan-kesempatan itu, Persis menyuarakan pernyataan, manifesto dan fatwa yang diharapkan memiliki konsekuensi politik.

Dari pernyataan dan statemen A. Hassan itu, dapat dipahami bahwa secara nyata menandakan keyakinannya yang amat kuat dari apa yang olehnya disebut

“pergerakan Islam”. Ketika A. Hassan ditanya apa itu pergerakan Islam? Ia menjawab: “usaha dan daya-upaya yang dilakukan oleh segolongan kaum muslimin yang mementingkan keislaman di dalam satu negeri, untuk mendapat kemerdekaan dari pemerintah asing, hingga dapat dijalankan padanya hukum-hukum Islam yang dengan sempurna di dalam hal keduniaan dan akhirat”. (A. Hassan, 1984)

Akan tetapi, untuk dapat mencerna maksud dari apa yang diinginkan A. Hassan itu tentu tidaklah secara serta merta diambil mentah-mentah. Dalam hal ini, penting untuk bisa mendudukan persoalan dalam ruang lingkup (konteks zaman) yang mengitarinya. Artinya, manifesto yang dikeluarkan oleh jama'ah Persis dahulu itu bukan untuk diikuti oleh generasi selanjutnya. Sebab, jika hal itu dipertahankan dalam konteks kekinian, lalu apa bedanya Persis dengan HTI, FPI, MMI yang menginginkan hal yang sama berdirinya negara Islam di Indonesia?

Persis mestinya steril dan tidak diidentikkan dengan partai-partai politik sebagaimana yang pernah ditunjukkan pada setiap momentum Pemilu, seperti yang terjadi pada 2004, dengan mendukung PBB dan PKS. Persis mestinya tetap sebagai organisasi keagamaan, dan dalam bidang politik hanya sebatas menyuarakan gerakan moral (*moral force*). Tidak lebih dari itu! Sebab Persis bukanlah partai politik yang ikut-ikutan dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.

Jika sikap ini (dukungan terhadap politik praktis) masih dilanggengkan dalam setiap momen-momen pemilihan kepala pemerintahan, secara nyata akan menyebabkan keretakan dalam tubuh Persis. Jangan disalahkan bila muncul *celotehan* dari sebagian anggota Persis dan anggota pengurusnya yang menyatakan bahwa mereka yang membelot ke partai atau politik praktis sebagai pengkhianat yang tidak taat kepada AD/ART keorganisasian pimpinan pusat (PP). (Akmal Burhanudin, 2000)

Artinya, Persis sekarang ini harus melihat sikap politik A. Hassan, dkk, dalam semangat zamannya, yang (mungkin) memang pada waktu itu sangat mendukung untuk menegakkan bendera Islam di tiang negara. Tidak kemudian dijadikan justifikasi dan legitimasi para petinggi Persis kembali menyuarakan keputusan organisasi yang tidak populis. Apalagi, gerakan politik Persis sekarang sudah mengarah pada politik praktis dan terjebak pada godaan kursi jabatan di parlemen. Inilah yang perlu diperhatikan bersama demi kebaikan dan jayanya Pesis ke depan.

2. Gerakan Dakwah Kultural

Gerakan dakwah kultural Persis boleh dibilang merupakan kebalikan dari gerakan dakwah NU. Persis sejak awal mengkampanyekan palarangan praktik-praktik TBC secara total, sementara NU tetap mempertahankan dengan tetap memasukkan nilai-nilai keislaman ke dalam pemahaman masyarakat yang melakoni praktik ritual tradisi-tradisi adat tersebut. Karenanya tak heran bila dakwah kultural NU banyak diterima di pedalaman dan pelosok daerah, sedangkan Persis hanya didominasi oleh orang-orang perkotaan yang secara akademik memiliki ilmu keagamaan yang memadai.

Tetapi yang lebih mencengangkan adalah Persis sangat dikenal dengan keberaniannya menantang untuk berdebat secara terbuka dengan kelompok atau individu yang tidak sepaham dengan keyakinan Persis. Misalnya, salah satu perdebatan sengit pernah terjadi di Cibeber, Cianjur pada 1937 antara Persis dan *al-Ittihaddul Islamiyyah* (sealiran dengan NU) menyangkut masalah membaca *al-fatihah* di belakang imam dan masalah membaca do'a. Sebelumnya, tahun 1932 juga terjadi perdebatan setelah pihak Persis melakukan tantangan dengan ulama-ulama Jawa Timur dari NU seperti KH. Wahab Hasbullah dan KH. Abdul Khair. (Mohammad Iskandar, 2001)

Dalam perdebatan-perdebatan yang berkecamuk itu, yang dipersoalkan sebenarnya tidak jauh dari gagasan besar Persis, yaitu kembali ke al-Qur'an dan hadis, ijtihad, mengharamkan taklid (sekadar ikut-ikutan tanpa tahu dalilnya), dan melarang mengikuti kitab-kitab berbahasa melayu. Tetapi dalam kaitan ini, sikap Persis akan tampak paradoks seperti yang akan digambarkan di bawah ini.

Ada kasus menarik yang pernah dimuat *Pembela Islam*. Seorang awam bertanya, ketika membaca fatwa-fatwa Persis, orang itu menjadi bingung. Di satu pihak, Persis menyuruh kembali ke al-Qur'an dan hadis, serta mengharamkan ijtihad para ulama mujtahid, terutama yang memakai bahasa Melayu. Tetapi di lain pihak, Persis justru mencetak kitab-kitab berbahasa Melayu, terutama A. Hassan. Seharusnya, kalau Persis menganggap kitab-kitab masa lalu, terutama yang berbahasa Melayu dibatalkan, seyogianya pula Persis tidak mencetak buku yang berbahasa Melayu. Karena, kalau masih ada kitab-kitab yang berbahasa Melayu, nanti orang-orang akan belajar dan

membaca kitab itu. (Nur Khalik Ridwan, 1998)

Jika demikian, “serupa juga dengan macam orang yang selama ini bertaklid. Malah lebih celaka lagi, sebab bertaklid pada ulama yang tidak mujtahid”. (Mohammad Iskandar, 2001) Dalam buku *Soal Djawab*, pertanyaan yang sama juga muncul, “bagaimana hukumnya orang-orang yang mengikuti kitab-kitab Persis?” A. Hassan menjawab: orang-orang yang menuruti sebagaimana yang ada dalam kitab itu tidak termasuk golongan yang bertaklid, tetapi *muttabi*’. Sebab kitab-kitab Persis menyertakan dalil-dalilnya. (Nur Khalik Ridwan, 1998)

Jawaban A. Hassan di atas sungguh disayangkan dan cenderung mengedepankan egoisme. Bagaimana tidak, secara tersurat A. Hassan mengatakan kitab-kitab ulama mujtahid masa lalu tidak terjamin kebenarannya, sedangkan kitab hasil karangannya sendiri dianggap bermutu dan layak untuk dijadikan “standar” hukum Islam. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada *founding fathers* Persis, di sinilah saya merasa keberatan atas apa yang ditampilkan oleh A. Hassan sebagai *icon* gerakan Persis, yang oleh “orang luar” dikesankan sebagai orang yang pintar memutarbalikkan kata.

Muhammad Iskandar dengan penuh kehatian-hatian merekam komentar *al-Ittihadul Islami* atas perdebatan yang diajukan kepada Persis tentang *ittiba*’:

Mengenai *ittiba*’ (mengikuti dengan tahu hukumnya), dan *muttabi*’ (orang yang mengikuti itu), pihak *al-Ittihadul Islami* menanggapinya secara akal-akalan A. Hassan saja. Menurut *al-Ittihadul Islami*, *ittiba*’ dan taklid sama saja, yakni mengikuti pendapat orang lain. Apakah betul semua orang Persis tahu dalil-dalil yang menjadi landasan praktik keagamaannya, lengkap dengan riwayat? Apakah benar semua pengikut Persis yang *muttabi*’ mengecek kembali kebenaran dalil-dalil dari al-Qur’an dan hadis, ataukah sebenarnya mereka kembali ke kitab...*Soal Djawab*. (Mohammad Iskandar, 2001)

Dari pembacaan kritis di atas, sudah semestinya Persis sekarang ini mengkaji ulang pemahaman keagamaan (nalar fiqih) yang berkembang di dalam *jam’iyyah*. Fiqih

yang dikembangkan dalam Persis sangat tekstual, dogmatis dan bersifat teosentris. Seolah-olah persoalan *furu'* dan fiqih adalah segala-galanya dalam agama, sehingga selalu dijadikan “andalan” dalam setiap pembicaraan menyangkut gerakan dakwah Persis.

Padahal, fiqih adalah produk hukum yang dihasilkan oleh para Imam madzhab dan generasi selanjutnya, dan bisa saja semua orang menghasilkan produk hukum lain yang berbeda antar individu sesuai kemampuannya. Fiqih bukanlah agama, dan bukan bula Firman Tuhan, tetapi hasil pemikiran manusia biasa yang sifatnya relatif. Sehingga tidak ada alasan orang—yang menurut Khaled M. Aboe El Fadl—berbicara kebenaran atas nama Tuhan (apalagi dengan fiqih?), sementara pemahaman terhadap teks agama tidak ada yang mutlak dan absolut. (R. Cecep Lukman Yasin Aboe Fadl, 2004) menggugat terhadap kecenderungan kaum agamawan sekarang ini yang seolah mengambil otoritas Tuhan dalam menjustifikasi benar atau tidaknya sesuatu berkenaan dengan agama.

Untuk itu pemahaman yang kontekstual dengan melihat problematika umat yang kian kompleks, adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh Persis. Secara praktis, mungkin sedikit banyak Persis perlu belajar dari NU dengan dalil *ushuliyah* yang terkenal, *al-muhafadhatu 'ala qadimi al-shalih wa al-akhdu bi al-jadidi al-aslah* (menjaga tradisi yang sudah ada/lama dan mengambil/menerima sesuatu yang baru asalkan demi kebaikan bersama). Di sini, barangkali gagasan tentang pluralisme agama dalam pengertian seluas-luasnya patut dikedepankan.

Dengan begitu, tak perlu lagi mengedepankan suatu pemahaman keagamaan yang kaku dan keras. Agar masyarakat *leghowo* (menerima) apa yang diyakini sebagai kebenaran dan kebaikan untuk agama. Dan yang paling penting juga tidak perlu masyarakat diajak (apalagi dipaksa?) untuk masuk ke dalam *jam'iyah*, sebab Islam hanya mengajarkan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan (kebenaran) dengan cara yang baik dan bijak.

3. Gerakan Dakwah melalui Pendidikan

Khusus untuk jalur lembaga pendidikan sebagai gerakan dakwah Persis sejak awal berdirinya sebenarnya kurang mendapat perhatian memadai dari kalangan pendirinya. (Dadan Wildan Anas, 2021) Lembaga pendidikan Persis hanya terlihat pada level pendidikan dasar dan menengah. Sementara untuk perguruan tinggi, kalau

pun ada, bisa dihitung jari. Mereka lebih mengutamakan dakwah kultural dengan mengkampanyekan kembali ke al-Qur'an dan hadis dan pelarangan TBC di tengah-tengah masyarakat. (Badri Khaeruman, 2021)

Kalaupun memerhatikan pendidikan, Persis melakukannya secara bertahap dan bukan merupakan produk dari rencana sistematis untuk memberikan sistem pendidikan Islam secara khusus. (Wanda Hernawan, 2021) Sejak berdiri, lembaga pendidikan Persis hanya berpusat di Bandung, sulit berkembang di luar tempat berdirinya itu.

Dalam hal ini, Persis tidak mirip dengan Muhammadiyah dan NU, yang menganggap pendidikan sebagai bagian terpenting dari organisasi mereka dan memberikan penekanan utama pada sistem pendidikan yang dikembangkan secara berkelanjutan, yang didefinisikan dengan baik dan dimaksudkan untuk memenuhi peran mereka dalam masyarakat. (R. Cecep Lukman Yasin Aboe Fadl, 2004) Padahal dalam konteks zaman sekarang, persepsi Persis itu jelas merupakan kesalahan besar.

Akibatnya yang terjadi seperti sekarang ini, Persis hanya bisa melongo ketika ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah membanggakan diri, yakni mempunyai lembaga pendidikan yang kokoh dan bonafit untuk ukuran standar pendidikan nasional di Indonesia, dan bahkan hingga mampu menembus standar internasional. Hal semacam ini mestinya disadari oleh Persis agar ikut serta memajukan pendidikan dengan melakukan massifitas gerakan dakwah melalui jalur pendidikan.

Bukan untuk latah dengan kilauan NU dan Muhammadiyah, tetapi melalui pendidikan setidaknya transformasi pengetahuan dan dakwah Islam dapat terlaksana dengan mudah dan sangat baik. Alih-alih memiliki perguruan tinggi (PT) yang hanya bisa dihitung dengan jari, untuk memberdayakan pesantren di luar daerah Bandung saja Persis (Pusat) tidak bisa mensinkronkan pesantren-pesantren yang sudah ada.

Lihat saja, di Jawa Timur, terdapat tiga pesantren Persis besar—Bangil, yang semula digagas A. Hassan langsung; di Camplong-Sampang yang didirikan oleh tokoh kharismatik Madura Sutardjo (alm); dan di Sepeken-Sumenep oleh Abu Hurairah (alumni Persis Bangil)—sangat jarang mendapat perhatian dan uluran tangan dari PP Persis. Alasannya, secara struktural tidak menginduk ke pusat, dan kadang terjadi “perselisihan” tentang paham keagamaan.

Kubu-kubuan antar blok, Persis barat dan timur tetap santer terdengar, yang sebenarnya itu tidak baik dan menghalangi kemajuan. Hal tersebut sangat tampak pada media atau majalah Persis barat yang diwakili oleh *Risalah* dan *al-Muslimin* sebagai majalah Persis timur terasa saling menyerang hanya lantaran *kebilafiyah*. Kaena itu, jika “konflik” Persis tidak segera disudahi, jangan pernah bermimpi Persis akan kembali menggaung dan dikenal oleh masyarakat luas sebagaimana yang pernah terjadi pada masa awal-awal berdirinya.

Ditambah lagi, kader Persis saat ini yang *notabene* menjadi tokoh masyarakat dan pendidik sudah mengalami kepudaran identitas kepersisannya. Di Jawa Timur, tokoh sekaliber Prof. Dr. Syafiq Mugni misalnya, yang pernah *nyantri* selama 6 tahun di Pesantren Persis Bangil, lebih memilih bergabung dengan Muhammadiyah dan bahkan menjadi petinggi di Pimpinan Wilayah hingga Pimpinan Pusat. Hal itu terjadi karena tidak adanya wadah Persis yang memberinya ruang—meski mungkin terdapat alasan lain ia memilih bergabung dengan Muhammadiyah.

Kalau mau jujur, Persis di luar Jawa Barat (Bandung) sebenarnya hanyalah tinggal nama dan formalitas. Para kadernya mungkin sudah “malu”, *emoh*, dan merasa tidak jelas lagi dengan agenda gerakannya. Menurut penuturan tokoh sepuh yang menjabat sebagai pimpinan daerah dan anggota PW Persis Jawa Timur (tinggal di Sumenep-Madura), bahwa pernah suatu kali pertemuan PW Persis hanya dihadiri oleh tak lebih dari sepuluh orang. Ironis.

Akhirnya, kembali pada persoalan pendidikan bagi Persis yang smestinya juga mendapat perhatian serius dan lebih, di samping dakwah kultural dan politik. Bukankah dalam pendidikan Islam sangat diperlukan untuk membantu meneguhkan eksistensi manusia dalam mengemban fungsi ‘*abid* dan *kebalifah*? Eksistensi manusia sangat ditentukan oleh sejauh mana ia mampu menjalankan kedua fungsi tersebut.

Di Mana Suara Kaum Muda Persis?

Bagian terakhir dari tulisan ini merupakan kritik terhadap kaum muda Persis, baik yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa (HIMA) Persis, Pemuda Persis, Persistri, atau apapun namanya yang juga ikut larut dalam lamunan dan tidur panjang. Jika paparan di atas mungkin lebih tepat ditujukan kepada “kaum tua” atau pemegang jabatan strategis di struktur PP, maka dalam tulisan penutup ini penting pula kita merefleksikan lemahnya sepak terjang kaum mudanya.

Untuk memajukan Persis, mestinya kaum muda yang darah juangnya tinggi tidak melulu “membeo” dan menyokong sepenuhnya terhadap kebijakan-kebijakan PP—sebagaimana yang diinginkan oleh pendiri-pendirinya pada awal mula diresmikannya organisasi kepemudaan itu berkisar tahun 1930-1936. (Dudung Abdurrahman, 2021) Kondisi ini sungguh memprihatinkan, karena organisasi kepemudaan secara sadar atau tidak telah menjadi kaki tangan dan alat penyampai segala kebijakan PP.

Jika dulu sempat terdengar pameo: NU identik dengan pemikirannya yang kolot, jumud, kaum sarungan, dan karenanya disebut tradisional; Muhammadiyah identik dengan pemikirannya yang lebih maju daripada NU, identik dengan “kaum berdasi”, dan karenanya disebut modernis; sementara Persis serupa dengan Muhammadiyah, tetapi memiliki progresifitas lebih maju darinya, identik dengan kaum yang memakai dasi sekaligus jas, dan karenanya disebut juga modernis. (Dadan Wildan Anas, 2021) Menurut Federspiel dan diikuti oleh Dadan Wildan Anas, ada tiga varian kelompok Islam. Pertama, tradisional diwakili oleh Nahdlatul Ulama. Kedua, modernis diwakili oleh Muhammadiyah. Ketiga, variasi dari kaum muda, diwakili oleh Persis yang menekankan pada pentingnya al-Qur’an dan hadis sebagai sumber penelitian dan penetapan suatu hukum. (Dadan Wildan Anas, 2021)

Tetapi seiring perkembangan zaman yang terus bergulir, nampaknya predikat itu telah terbalik. Persis-lah kini yang identik dengan “kaum sarungan”, jumud, dan kolot, karena dalam bidang pemikiran keislaman telah tertinggal jauh dari NU maupun Muhammadiyah. Lihatlah para pembesar NU dan Muhammadiyah yang kini disibukkan dengan ikut andil menyelesaikan problematika sosial nasional maupun internasional, yang digodok secara serius dalam *Bahstu al-Masail* NU dan Dewan Tarjih Muhammadiyah. Sementara Persis masih berkuat dengan problem boleh tidaknya orang membaca *ushalli*, *talqin*, *tawashul* dan segudang persoalan fiqih lainnya.

Ketika kaum muda NU dan Muhammadiyah mengkaji dengan serius tentang dampak dan positif tidaknya kapitalisme, neoliberalisme, serta persoalan global lain, sementara kaum muda Persis masih berbicara soal bagaimana metode yang baik menyampaikan dakwah Islam di kampus dan di kalangan pemuda sekarang ini. Ironisnya lagi, meski telah banyak di antara kalangan kaum mudanya (Persis) sekolah

ke luar negeri (terutama Timur Tengah: Mesir, Madinah, Pakistan, dan sebagainya), justru ketika pulang ke Tanah Air justru menyuarkan paham “Arabisme” yang identik dengan gerakan Wahabi.

D. Penutup

Di antara faktor penyebab melambatnya laju gerakan pembaruan Islam Persis, dibanding Muhammadiyah, misalnya, karena kurang mampu beradaptasi secara fleksibel dengan situasi sosial modern. Paham keagamaan Persis yang cenderung normatif, eksklusif, dan konservatif, turut mempengaruhi cara berpikir orang-orang Persis. Situasi ini jika tidak direvitalisasi, akan terus mengalami stagnasi gerakan. Revitalisasi diperlukan pada setidaknya tiga aspek, yaitu gerakan politik, gerakan dakwah, dan bidang pendidikan.

Daftar Pustaka

- Abdurahman, Dudung. (t.t). “Persatuan Islam (Persis) pada Masa Kontemporer 1945-2015”, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40464/1/document.pdf>, diakses 5 Juni 2021.
- Anonim (t.t), “Persatuan Islam dalam Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia”, dalam <http://repository.uinbanten.ac.id/281/4/BAB%20III.pdf>, diakses 17 Juni 2021.
- Anonim (t.t), “Organisasi Persatuan Islam Tahun 1924-1942”, dalam <http://repository.uinbanten.ac.id/281/5/BAB%20IV.pdf>, diakses 18 Agustus 2022.
- Badri Khaeruman (t.t), “Pemikiran Keagamaan Persatuan Islam”, dalam *Anatomi Gerakan Dakwah Persatuan Islam*, t.k: t.p, <http://digilib.uinsgd.ac.id/11943/1/PERSIS.pdf>, diakses 18 Juli 2021.
- Burhanudin, Akmal. (2000). “Muhammad Abduh dan Pengaruhnya terhadap Jam’iyah Persatuan Islam”, dalam *Siapkah Persis Menjadi Mujaddin Lagi? Upaya Menujudkan Wacana Persis Baru*, Bandung: ALQAPRINT.
- Dadan Wildan Anas (t.t), “Perjalanan Sejarah Persatuan Islam”, dalam *Anatomi Gerakan Dakwah Persatuan Islam*, t.k: t.p, <http://digilib.uinsgd.ac.id/11943/1/PERSIS.pdf>, diakses 18 Juli 2021.

- Daya, Burhanuddin. (1995). *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Fadl, Khaled M. Aboe El. (2003). *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, Oxford: Oneworld Publications.
- Federspiel, Howard M. (2004), *Labirin Ideologi Muslim: Pencarian dan Pergulatan Persis di Era Kemunculan Negara Indonesia (1923-1957)*, terj. Ruslani dan Kurniawan Abdullah, Jakarta: Serambi.
- (1996). *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*, terj. Yudian W. Asmin dan Afandi Muchtar, Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Hamim, Thoha. (2000). *Paham Keagamaan Kaum Reformis*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hassan, A. (1984). *Islam dan Kebangsaan*, Bangil: LP3B.
- (1998). *Soal Jawab tentang Berbagai Soal Agama*, Bandung: CV. Diponegoro.
- Iskandar, Mohammad. (2001). *Para Pengemban Amanah*, Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Noer, Deliar. (1996). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Ridwan, Nur Khalik. (2004). *Agama Borjuis: Kritik Atas Nalar Islam Murni*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Ridha, Rasyid. (t.t). *Tafsir al-Manar*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr.
- Salim dan Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* .Bandung: Citapustaka Media, 2012.
<http://repository.uinsu.ac.id/552/1/METODOLOGI%20PENELITIAN%20KUALITATIF.pdf>
- Wanda Hernawan, "Peranan Persatuan Islam (Persis) dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Kota Bandung, 1988-2019", dalam *Skripsi*,
<https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/4223/1/Wanda%20Hernawan.pdf>, diakses 1 Juni 2021.